

BAB 3

KONDISI PENDIDIKAN ISLAM DI KABUPATEN MAJALENGKA SEBELUM 1941

Pendidikan di Hindia Belanda baru mendapatkan kepastian hukum ketika Raja Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 95 Tanggal 30 September 1848. Melalui keputusan itu, Gubernur Jenderal Rochussen diberi wewenang untuk memasukkan dana pendidikan dalam anggaran Pemerintah Hindia Belanda. Dana pendidikan sebesar 25.000 gulden per tahun anggaran itu, dimaksudkan untuk mendirikan sekolah bumiputera untuk menghasilkan calon-calon pegawai di lingkungan birokrasi kolonial. Dalam pelaksanaan, proses menyebarluaskan kesempatan sekolah bagi penduduk bumiputera tidaklah sama untuk setiap wilayah dan strata sosial penduduk. Pada awalnya, sekolah bumiputera itu pun didirikan hanya untuk kalangan masyarakat dari strata sosial tertinggi, seperti keturunan bupati. Sementara itu, bagi kalangan masyarakat dari strata sosial rendah, pemerintah membuka sekolah desa. Di Majalengka, sekolah desa baru diperkenalkan pada awal abad ke-20 oleh Bupati R. A. Sasra Ningrat (1902-1922). Akan tetapi, sekolah pribumi yang bukan didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, sudah dikenal oleh masyarakat Majalengka, diantaranya pesantren dan madrasah⁴¹.

⁴¹ Abdul Halim. 1928. *Pedoman Propaganda Persatoean Islam*. Madjalengka: tp. KITLV. Hal 29

Dalam bidang pendidikan mulai dilakukan perluasan pengajaran pada 1907. Sementara, untuk meningkatkan kesehatan kaum bumiputera, mulai dilakukan pemberantasan penyakit menular, seperti: pes, kolera, malaria dan sebagainya.

Sedangkan untuk mengurangi penduduk pada daerah-daerah yang padat di Jawa, karena semakin luasnya daerah perkebunan dan bertambahnya penduduk, dilakukan transmigrasi⁴². Mula-mula dari daerah Jawa Tengah ke ujung Jawa Timur untuk bekerja pada perkebunan tebu. Transmigran ke daerah luar Jawa dikirimkan sebagai tenaga kerja ke daerah-daerah perkebunan Sumatera Utara, khususnya di Deli. Sedangkan transmigrasi ke Lampung mempunyai tujuan untuk menetap. Pada sisi yang lain, dijumpai pula situasi, bahwa meskipun politik etis sudah diberlakukan sejak 1900-an, anak-anak dari kalangan pribumi tetap sulit untuk mendapatkan pendidikan pada lembaga pendidikan kolonial. Dalam situasi seperti itu, di antara kaum muda Muslim bumiputera yang beruntung lebih memilih pendidikan agama (Islam) dari pesantren-pesantren dan selanjutnya melanjutkan pendidikannya ke Timur-Tengah

Lembaga pendidikan pesantren masih terus hidup dan berkembang di Majalengka ketika pendidikan formal mulai dibuka oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menekankan pada upaya penguasaan ilmu keislaman. Istilah pesantren itu

⁴² Balai Pustaka, 1976. *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka. Hal 34

sendiri berasal dari kata *santri* yang diberi awal *pe* dan akhiran *an* sehingga terbentuk istilah '*pesantrian*' yang berarti tempat tinggal para santri. Dalam perkembangannya, istilah *pesantrian* itu mengalami perubahan bunyi menjadi *pesantren* yang ke-mudian menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Secara umum, dikenal dua pendapat mengenai asal usul pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam⁴³. Pendapat pertama mengemukakan bahwa pesantren merupakan bagian dari tradisi Islam. Mereka menyatakan bahwa pesantren lahir dari pola kehidupan tassauf yang dikenal dengan sebutan *zawiyat*. Pola kehidupan tersebut kemudian berkembang di dunia Islam, terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sebagai pusat pendidikan Islam, sudah barang tentu pesantren memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, karena lembaga pendidikan tersebut berkedudukan sebagai pusat penyebaran dan pemantapan ketaatan masyarakat terhadap Islam. Dengan perkataan lain, pesantren merupakan lembaga pendidikan umum bagi rakyat Indonesia selama berabad-abad.

Meskipun pesantren lebih berperan pada aspek sosial budaya, bukan berarti tidak memiliki peran politik. Walaupun sangat terbatas, pesantren masih memiliki pengaruh politik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki *religious power*

⁴³ Iskandar, Muhammad. 1991. *Para Pengemban Amanah Pergulatan Kyai dan Ulama di Jawa Barat 1900-1950*. Yogyakarta: Mata Bangsa. Hal 25

sehingga dapat dipakai oleh pemerintah dan para politisi sebagai alat untuk mendapat dukungan politik. Walaupun demikian, acap kali *religious power* yang dimiliki pesantren itu menjadi pendorong bagi perjuangan politik seperti yang terjadi pada gerakan-gerakan: sosial, keagamaan, dan pembaharuan pendidikan baik di Jawa maupun di luar Jawa.⁴⁴

Pola umum pendidikan di pesantren tradisional dilakukan dengan cara memberikan teladan dari kyai tentang sesuatu yang ideal menurut ajaran Islam, yaitu perilaku, pola pikiran dan perasaan, simbol-simbol, dan amalan-amalan Islam. Selain diberikan secara langsung oleh kyai dalam kehidupannya sehari-hari, para kyai pun memberikannya melalui majelis taklim yang lebih dikenal dengan pengajian. Pengajian yang diberikan oleh kyai itu, tidak sebatas di dalam lingkungan pesantren saja, melainkan juga menjangkau masyarakat yang bukan santri.⁴⁵ Sementara itu, sistem pengajaran yang berlaku di pesantren biasanya dalam bentuk *sorogan* dan *bandongan* atau disebut juga *system weton*. *Sorogan* diberikan kepada santri tingkat awal yang dianggap telah menguasai pembacaan al Quran. Santri memperoleh kahliannya dalam membaca al Quran dari seorang guru yang biasanya memiliki murid tidak lebih dari empat orang. *Sorogan* merupakan sistem pengajaran paling awal dalam sistem pendidikan Islam tradisional. dapat menguasai pembacaan al Quran, menguasai bahasa Arab, dan pada

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Dhofier, Zamakhsari. 1982. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES. Hal 53

akhirnya dapat mengikuti pendidikan lanjutan di pesantren, yang menerapkan sistem *bandongan*, secara optimal.

Sistem *bandongan* merupakan sistem pengajaran utama di lingkungan pesantren. Sekelompok santri yang berjumlah antara 5-500 orang mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Hal-hal yang dianggap sulit dicatat oleh santri di atas bukunya sehingga akan memudahkan dirinya dalam proses memahami inti ajaran yang diberikan guru. Kelompok belajar ini lebih dikenal dengan sebutan *halaqah* yang secara harfiah berarti lingkaran santri atau sekelompok santri yang belajar di bawah bimbingan seorang guru. Materi pokok yang diberikan oleh para kyai kepada para santrinya selalu berkenaan dengan ilmu-ilmu keagamaan, seperti fiqih, tauhid, hadits, tafsir quran, dan materi lain yang berasal dari kitab kuning. Pesantren dengan metode dan kurikulum seperti ini kemudian dikenal dengan sebutan pesantren tradisional.⁴⁶ Di samping pendidikan pesantren, sampai awal Abad ke-20 di Majalengka pun sudah dikenal lembaga pendidikan formal yaitu sekolah-sekolah yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda. Lembaga pendidikan ini lebih menekankan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan umum sehingga ilmu keagamaan tidak diperhatikan dan memang tidak tercantum dalam kurikulumnya. Sistem pengajaran yang diterapkan di lembaga sekolah-sekolah umum adalah dengan menggunakan sistem kelas.

⁴⁶ Hidajat, Abu Sjahid. 1967. "K. H. Abdul Halim; Hidup dan Perjuangannya" dalam *Panji Masyarakat*. No. 2. Tahun II. Hal 22

Pendidikan jenis ini sudah dikenal pada abad ke-19, seperti yang dikemukakan pada awal bab ini. Akan tetapi, sampai tahun 1907, masyarakat pribumi sangat terbatas untuk dapat sekolah di lembaga pendidikan formal ini. Hal tersebut terjadi karena tujuan pembukaan sekolah ini adalah untuk masyarakat Eropa (Belanda) dan masyarakat pribumi kelas atas (ningrat). Baru sejak tahun 1907, kesempatan sekolah bagi anak-anak pribumi semakin terbuka seiring dengan dibukanya sejumlah *Volkscholen* (Sekolah Rakyat) yang disebut juga Sekolah Rakyat atau Sekolah Desa. Meskipun demikian, dilihat dari kurikulum dan tujuan pendidikannya, sekolah ini sangat berbeda dengan sekolah dasar bagi masyarakat Belanda dan masyarakat pribumi kelas atas. Seiring dengan diperkenalkannya Politik Etis tahun 1901, dalam kerangka kepentingan kolonialisme Belanda, pemerintah membuka sekolah-sekolah bagi kalangan penduduk pribumi. Meskipun demikian, diskriminasi terhadap kemudahan mendapatkan pendidikan masih juga belum dapat dihapus, karena memang kebijakan pendidikan, sekali lagi, tidak dapat dilepaskan dari politik kolonial Belanda. Seperti halnya di daerah lain di Indonesia, pendidikan kolonial yang berkembang di Majalengka dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian.

Pertama pendidikan umum yang bertujuan hendak memberi pengetahuan dasar bagi semua lapisan masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Secara umum, sekolah umum dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu sekolah rakyat (sekolah desa dan sekolah gubernemen

kelas II), sekolah Belanda untuk pribumi (*Hollandsch Inlandsch School-HIS*, *Meer Uitgebreid Lager nderwijs-MULO*, Sekolah Partulir, *Hoogere Burgersschool-HBS*), sekolah Belanda untuk orang Cina (*Hollandsch Chinese School-HCS*), dan sekolah Belanda untuk orang Belanda/Eropa lainnya (DHS dan KWS⁴⁷).

Sekolah umum seperti disebutkan di atas, dikenal pula sekolah khusus yang bertujuan mencetak calon bagi pekerjaan tertentu. Sekolah jenis ini cukup banyak, di antara (1) *Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA), yakni sekolah bagi anak-anak kaum bangsawan yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan birokrasi kolonial; (2) *Bestuurschool*; (3) *Kweekschool voor Inlandsche Onder-wijs* atau dikenal juga dengan sebutan Sekolah Raja.⁴⁸ Setelah Batavia dan Solo, Jawa Barat juga membawa riwayat gemilang tersendiri bagi perkembangan pendidikan Islam. Kepulangan Abdul Halim (1911) dari Timur Tengah yang diduga dilatari oleh keprihatinannya terhadap nasib dunia pendidikan masyarakat bumiputera ia segera mengubah sistem pendidikan di daerahnya, Majalengka. Mula-mula ia mendirikan lembaga Madjlisoel ‘Ilmi pada 1911. Disebutkan, untuk pertama kalinya Madjlisoel ‘Ilmi menempati sebuah langgar yang panjang dan lebarnya tidak lebih 8 M² dan bertiang bambu. Para murid yang belajar pada waktu itu, ialah: Sjafari, Abdoelfatah, Adnan, Ahmad Sjoto, Oemar Djahoeri, Djamaloeddin, Kosim, dan Zoehri.

⁴⁷ Sukarsa, Dartum. 2007. *Potret K. H. Abdul Halim dalam Eksistensi Nasionalisme dan Perbaikan Umat (1887-1962)*. Bandung: Sarana Panca Karya Nusa Hal 23

⁴⁸ Ibid